



Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Tinggi (Studi Kasus: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana)

Ni Kadek Bella Akmilia Putri

Komang Adi Sastra Wijaya

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Correspondence: bellaakmilia@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the extent to which the implementation of this program is in realizing equitable higher education. This study applies a qualitative type with a descriptive approach. The analysis uses the Program Implementation theory from Charles O. Jones. The findings show that the implementation of the KIP Merdeka College Program is very significant in realizing equitable higher education at the Faculty of Social and Political Sciences, Udayana University. However, there are several obstacles in the interpretation dimension such as lack of socialization, for example socialization related to the technical and procedures for filling in monitoring and evaluation which results in many students experiencing errors and confusion. In addition, there is minimal socialization regarding the accountability of the use of living expenses to students receiving the KIP Kuliah Merdeka program, as well as limited transparency of information regarding the time of disbursement of funds and the technical amount of living expenses assistance. However, in terms of organization and application, the implementation of this program is running optimally. In terms of organization, there is a clear organizational structure and implementation of tasks. Meanwhile, in the application, the results obtained showed that this program was positively accepted by students and could provide assistance in the form of open access and opportunities to pursue higher education, up to the beginning of equalizing higher education.

Keywords: Program Implementation, KIP Kuliah Merdeka, Higher Education Equity, Fisip Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi program ini dalam mewujudkan pemerataan pendidikan tinggi. Penelitian ini menerapkan tipe kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis menggunakan teori Implementasi Program dari Charles O. Jones. Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi Program KIP Kuliah Merdeka sangat signifikan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan tinggi di Fisip Universitas Udayana. Namun terdapat beberapa kendala dalam dimensi interpretasi seperti kurangnya sosialisasi, misalnya sosialisasi terkait teknis dan prosedur pengisian, monitoring dan evaluasi yang mengakibatkan banyak siswa mengalami kesalahan dan kebingungan. Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai pertanggungjawaban penggunaan biaya hidup kepada mahasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka, serta keterbatasan keterbukaan informasi waktu terkait pencairan dana dan teknis besaran bantuan biaya hidup. Meskipun demikian dari segi organisasi dan aplikasi, implementasi program ini berjalan optimal. Dari segi organisasi terdapat susunan organisasi dan pelaksanaan tugas yang jelas. Sedangkan dalam aplikasi diperoleh hasil bahwa program ini mampu diterima secara positif oleh siswa dan dapat memberikan bantuan berupa keterbukaan akses dan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi, hingga permulaan pemerataan pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Implementasi Program, KIP Kuliah Merdeka, Pemerataan Pendidikan Tinggi, Fisip Universitas Udayana

I. Pendahuluan

Pendidikan adalah hal yang amat penting bagi keberlangsungan hidup seseorang, melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan potensi diri. Sejalan dengan hal tersebut Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan kemajuan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan

batin dan karakter), pikiran (intelekt) serta tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunia (Febriyanti, 2021).

Bukan hanya penting bagi kehidupan perseorangan, dewasa ini pendidikan merupakan pondasi kokoh untuk mewujudkan kemajuan suatu bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan empiris, dimana beberapa negara maju di Eropa seperti Swiss, Jerman, Canada, USA, dan sebagainya menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan negaranya. Mereka menawarkan kebijakan pendidikan terbaik, seperti skema edukasi program pendidikan berkualitas tinggi, pendidikan yang inovatif melalui kolaborasi antara universitas dan industri, menerapkan sekolah atau kuliah tanpa biaya, penetapan kurikulum yang fleksibel, dan sebagainya (Sun Education, 2023).

Selain itu menurut UNESCO (2024), pendidikan adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Investasi pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan individu yang berpengetahuan, terampil, dan berbudaya yang merupakan aset berharga untuk mewujudkan kemajuan negara. Oleh karena itu, sering kali pendidikan dipandang penting untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan peran pendidikan memiliki keterkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), dimana dengan penerimaan pendidikan yang berkualitas akan merangsang terciptanya SDM yang lebih siap akan tantangan, memiliki pemikiran yang analitis dan kritis, dapat mengaplikasikan dan menciptakan teknologi baru dalam bidang pekerjaannya, sehingga sumber daya manusia tersebut akan lebih unggul, produktif dan inovatif. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Kardina dan Magriasti (2023) pendidikan memiliki kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan inovasi dan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, saat ini pentingnya pendidikan bagi individu maupun negara tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai proses dalam melahirkan SDM yang inovatif, produktif, dan mampu bersaing, salah satu jenjang pendidikan yang berperan krusial dalam mendorong hal tersebut adalah pendidikan tinggi.

Keberadaan pendidikan tinggi dalam suatu negara mampu memberikan dorongan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada negara tersebut, dengan adanya pendidikan tinggi maka akan membekali individu dengan pengetahuan dan keahlian yang mendalam pada bidang tertentu. Dimana akan membuat mereka lebih siap untuk pekerjaan yang lebih kompleks dan membutuhkan keahlian khusus, sehingga mendorong inovasi dan kemajuan di berbagai sektor seperti teknologi, kesehatan, pemerintahan dan industri. Hal tersebut juga membuka peluang untuk mencetak tenaga kerja yang terampil, inovatif dan juga mampu beradaptasi dengan IPTEK, sehingga berkaitan juga dengan produktivitas dan daya saing negara (Kardina, & Magriasti, 2023).

Selanjutnya pendidikan tinggi juga dapat merangsang sumber daya manusia yang memiliki keterampilan untuk berpikir kritis, analisis yang dapat melatih *problem solving* mereka dan mampu memecahkan masalah secara kompleks. Hal ini sejalan dengan pendapat Presiden RI Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berperan strategis dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan juga unggul. Tidak hanya dari penguasaan ilmu pengetahuan semata, sikap untuk terus belajar, akan membentuk SDM yang kuat mental, moral dan juga fisiknya, sehingga menjadi SDM yang inovatif serta dapat menghasilkan karya yang berkualitas. Dalam mendukung proses tersebut kini pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami perkembangan dan saat ini penyelenggaraan pendidikan tinggi telah dilaksanakan melalui perguruan tinggi yang menyebar luas di beberapa wilayah Indonesia (PPID, 2024).

Secara garis besar, perguruan tinggi di Indonesia telah terbagi menjadi empat bagian, diantaranya yaitu perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), perguruan tinggi kedinasan (PTK) dan perguruan tinggi akademik (PTA). Adapun jumlah perguruan tinggi tersebut yaitu:

Tabel 1. Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2019-2022

Tahun	Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK)	Perguruan Tinggi Akademik (PTA)
2019	122	3.129	178	1.192
2020	122	3.044	187	1.240
2021	125	2.290	171	1.195
2022	125	2.982	171	1.244

Sumber: Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan RI

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa di negara Indonesia telah tersedia beberapa jenis perguruan tinggi yang tersebar pada berbagai wilayah, hal tersebut tentunya akan membuka akses untuk siswa yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikan tinggi berdasarkan domisili atau minatnya. Berhubungan dengan hal tersebut, apabila menilik keadaan saat ini semenjak diberlakukannya wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat tingginya animo orang-orang yang terpacu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Hilmy, 2021).

Tingginya animo orang-orang di Indonesia untuk memperoleh pendidikan tinggi dapat dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik (2023) yang menunjukkan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi yang saat ini mencapai angka persentase tertinggi selama 5 tahun terakhir dengan capaian 31,45%. Meningkatnya hasrat untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi juga dapat disebabkan oleh beragam faktor, diantaranya seperti faktor standarisasi sistem penerimaan pekerja di dalam negeri. Dimana saat ini banyak perusahaan seperti: BUMN,BUMS dan sebagainya yang menetapkan banyak posisi lowongan kerja dengan sejahtera menempuh pendidikan minimal S1 (Jobstreet, 2024).

Alasan lain yang mendorong orang-orang untuk menempuh pendidikan tinggi di Indonesia yaitu, adanya anekdot bahwa semakin tinggi pendidikan yang diperoleh oleh seseorang maka semakin besar harapan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut tentu mendasari, bagaimana pendidikan merupakan jembatan menuju mobilitas sosial. Dimana menurut Abdullah Idi dalam Mukmin (2018) menyebutkan bahwa mobilitas sosial adalah gerakan berpindahnya satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, dalam konteks ini pendidikan dipandang sebagai kegiatan mobilitas sosial menuju perubahan yang lebih baik.

Selain disebabkan oleh standarisasi penerimaan kerja dan hasrat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, peran beasiswa juga ternyata menjadi faktor pendorong seseorang untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi. Tidak dipungkiri keberadaan beasiswa membuat seseorang mudah untuk mendapatkan akses dalam menempuh pendidikan tinggi, sehingga mereka dapat memperoleh peluang dan kesempatan belajar pada perguruan tinggi. Dimana sejalan dengan hal tersebut beasiswa dipandang sebagai penghargaan yang diserahkan kepada seseorang untuk dapat meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, penghargaan tersebut menyerupai akses tertentu pada suatu institusi atau dapat berupa bantuan biaya (uang). Dengan adanya bantuan tersebut, seseorang tidak lagi perlu mengkhawatirkan biaya yang tinggi untuk menempuh pendidikan, oleh karena itulah peran beasiswa dapat membuka kesempatan untuk masuk perguruan tinggi, serta mendorong hasrat seseorang untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi (Ilham, dkk, 2018).

Memandang bahwa pelaksanaan beasiswa ini dapat memberikan peluang dalam membantu seseorang untuk memperoleh pendidikan tinggi, beberapa tahun terakhir, tingkat perguruan tinggi di Indonesia sudah

menarik diri untuk menyediakan beragam beasiswa dalam memperoleh kesempatan belajar di perguruan tinggi. Salah satu wadah perguruan tinggi yang menyediakan beasiswa tersebut adalah universitas-universitas negeri. Pada saat ini banyak universitas negeri yang memberikan pengadaan program beasiswa dengan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta seperti Sampoerna, Cimb Niaga, Djarum, Astra, Lazada, dan sebagainya (Valerina, 2024).

Penelitian ini menggunakan berbagai studi terdahulu sebagai referensi untuk membandingkan dan menganalisis kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada penelitian sebelumnya. Kajian pustaka ini menjadi penting karena memberikan dasar untuk memperkuat argumentasi penelitian dan menunjukkan posisi penelitian ini dalam lingkup akademik yang lebih luas.

Penelitian pertama yang dijadikan rujukan berasal dari Imam Bashori, Tunggul Sihombing, dan Muryanto Amin (2023) yang berjudul *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan secara spesifik implementasi kebijakan BLT di Desa Simpang Kiri. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BLT sudah cukup baik, meskipun masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan anggaran, tumpang tindih data penerima, serta keterlambatan pencairan dana. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan teori implementasi kebijakan, sementara perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Jika penelitian Bashori et al. (2023) berfokus pada implementasi kebijakan BLT di Desa Simpang Kiri, maka penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Referensi kedua diambil dari penelitian Ni Luh Putu Janu Riana, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, dan Komang Adi Sastra Wijaya (2023) yang berjudul *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Denpasar*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan KIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui sosialisasi. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan teori implementasi dan fokus pada program pemerintah berbasis kartu. Namun, perbedaan utama terletak pada objek kajian yaitu KIA dan lokasi di Disdukcapil Kota Denpasar, sementara penulis meneliti KIP Kuliah Merdeka di Universitas Udayana.

Kajian selanjutnya adalah penelitian dari Fatimah Sariri dan Indah Prabawati (2024) berjudul *Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan bertujuan untuk mengevaluasi program KIP-K di Unesa berdasarkan indikator evaluasi dari William Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program memberikan dampak positif, namun masih ditemukan penerima yang tidak tepat sasaran. Kesamaan yang dimiliki dengan penelitian ini yaitu fokus pada program KIP Kuliah, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan teoritik yang digunakan, dimana Sariri dan Prabawati menggunakan teori evaluasi, sementara penulis menggunakan teori implementasi. Lokasi penelitian pun berbeda, yaitu di Universitas Negeri Surabaya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Penelitian berikutnya yang relevan yaitu dari Paulino P. Reyes II (2019) dengan judul *The Implementation of The Scholarship Programs Among The Student Grantees and Scholars of Kalinga University*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis ANOVA dan bertujuan menilai pelaksanaan program beasiswa di Kalinga University. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program beasiswa cukup berhasil, meskipun ada permasalahan seperti keterlambatan administrasi oleh mahasiswa. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap program beasiswa pendidikan tinggi, namun berbeda dari sisi pendekatan metodologis, teori yang digunakan, dan lokasi penelitian.

Kajian pustaka terakhir berasal dari Mohammad Shahjahan, Humaun Kabir, dan Irish Akhter Moon (2023) yang menulis *Effectiveness of Government Stipend Program for University Students With Disability in Bangladesh: A Study in Dhaka City*. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan pengumpulan data melalui survei dan wawancara untuk menilai efektivitas program tunjangan bagi

mahasiswa penyandang disabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa program memiliki dampak positif namun membutuhkan penyesuaian terhadap nilai beasiswa. Kesamaan dari penelitian ini dengan milik penulis adalah sama-sama mengkaji program beasiswa pendidikan tinggi, sedangkan perbedaannya terdapat pada pendekatan teoritik yang digunakan—penelitian Shahjahan et al. menggunakan teori efektivitas sementara penelitian ini menggunakan teori implementasi—serta perbedaan objek kajian dan lokasi.

Landasan konseptual dalam penelitian ini mengacu pada konsep-konsep dasar yang relevan dan menjadi kerangka berpikir dalam mengkaji topik yang diangkat. Salah satu konsep utama adalah Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka, sebuah kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Program ini diatur dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 serta Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023, dan merupakan pengembangan dari program Bidikmisi serta KIP Kuliah sebelumnya (BPK, 2020; Puslapdik, 2022). Tujuan dari program ini meliputi peningkatan akses pendidikan tinggi, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dari daerah tertinggal dan rentan, serta meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi secara nasional.

Konsep kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerataan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2023), pemerataan bermakna proses atau tindakan untuk menyebarluaskan sesuatu secara merata. Dalam konteks pendidikan, pemerataan berarti memberikan kesamaan hak dan akses kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Wadirman (1993) dalam Harun (1998), serta didukung oleh Coleman (1966), Farrel (1982), dan Ace Suryadi (1993). Pemerataan pendidikan mencakup kesamaan kesempatan untuk masuk sekolah, bertahan, meraih keberhasilan, dan memperoleh manfaat dari pendidikan itu sendiri. Pemerataan pendidikan juga tidak lepas dari konsep aksesibilitas, yang mencakup fasilitas, biaya, serta kebijakan non-diskriminatif (Perdana, 2024). Hakim (2016) menekankan bahwa pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan upaya pemerintah agar masyarakat dari berbagai latar belakang, baik dari desa maupun kota, miskin maupun kaya, memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Upaya-upaya ini termasuk alokasi anggaran pendidikan, penyediaan BOS, serta peluncuran program bantuan pendidikan seperti KIP.

Konsep ketiga dalam kajian ini adalah pendidikan tinggi. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi program diploma, sarjana, magister, doktor, serta pendidikan profesi dan spesialis. Harsono (2008) dalam Fahmi (2020) menyatakan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan mencetak lulusan dengan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk pribadi yang berbudi pekerti luhur, serta siap berperan dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Sejalan dengan itu, Markum (2007) dalam Mar'ati (2018) menyebutkan bahwa pendidikan tinggi menyiapkan peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkontribusi pada kemajuan bangsa. Maka, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing dalam era global.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat postpositivisme dan meneliti objek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, dan data dikumpulkan menggunakan teknik triangulasi (Sugiyono, 2022). Penelitian ini mengutamakan makna daripada generalisasi (Abdussamad, 2021), serta menggambarkan fenomena secara sistematis dan akurat, sesuai dengan karakteristik penelitian deskriptif (Nazir, 2014 dalam Utami, 2021). Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di lapangan untuk mendalami fenomena yang terjadi, khususnya pada pelaksanaan Program KIP Kuliah Merdeka di FISIP Universitas Udayana.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berperan langsung dalam pelaksanaan program, seperti Wakil Rektor III, Kepala Biro Kemahasiswaan, Wakil Dekan III FISIP, pegawai pengelola KIP Kuliah Merdeka, dan mahasiswa penerima program. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti panduan KIP, laman Kemendikbud, serta situs resmi Universitas Udayana (Moleong, 2001 dalam Supawetri, 2022).

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup individu-individu yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan program, yakni para pejabat kampus dan mahasiswa penerima program (Suprayogo, 2001 dalam Khairuddin, 2019). Lokasi penelitian ditetapkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman, Denpasar (Lafaifa Wibawa, dkk, 2022).

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang memahami konteks dan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2022). Informan yang diwawancarai mencakup pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan hingga pelaksanaan KIP Kuliah Merdeka.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami konteks dan menyusun panduan wawancara (Sidiq & Choiri, 2019). Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari informan secara langsung (Sugiyono, 2022), dan dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi serta arsip pendukung lainnya (Sidiq & Choiri, 2019).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument*, yang menetapkan fokus, memilih informan, dan menganalisis serta menafsirkan data (Sugiyono, 2022). Peneliti juga menggunakan panduan wawancara dan daftar informasi sebagai alat bantu.

Analisis data mengikuti model dari Miles dan Huberman dalam Abdussamad (2021), yang meliputi reduksi data (menyaring informasi penting), penyajian data (melalui narasi, tabel, grafik), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan bersifat sementara dan dapat berubah selama proses pengumpulan data berlangsung.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Temuan Penelitian

hasil temuan terkait implementasi Program KIP Kuliah Merdeka di FISIP Universitas Udayana yang dibagi dalam tiga dimensi utama: organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Pada dimensi organisasi, pelaksanaan program ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 334/UN14/HK/2025 yang menunjuk Dr. I Made Anom Wiranata sebagai verifikator dan Ida Ayu Putu Meiyanthi sebagai operator verifikator. Struktur organisasi bersifat ad hoc dan mencakup berbagai unsur seperti pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, validator, hingga teknis sistem dan administrasi. Dari sisi sumber daya pendukung, baik SDM maupun finansial telah memadai. SDM dinilai cukup baik karena tugas pengelola hanya mencakup verifikasi, monitoring, dan evaluasi, sedangkan dana operasional sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat. Tugas pengelola dilaksanakan sesuai SK Rektor, meliputi verifikasi dan validasi daring, pelaporan status mahasiswa, serta monitoring dan evaluasi berkala. Manajemen pelaksanaan dilakukan melalui koordinasi dalam rapat pengarah, pleno, serta proses monitoring dan evaluasi antar pihak pengelola KIP Kuliah.

Pada dimensi interpretasi, pengelola program menunjukkan pemahaman yang selaras terkait substansi dan sasaran program, yakni membantu mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Komitmen dan konsistensi pengelola terlihat dari pelaksanaan tugas yang sesuai dengan SK Rektor dan petunjuk teknis Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023. Mereka juga rutin melakukan monitoring dan menjalin komunikasi dengan mahasiswa penerima. Meski begitu, terdapat kendala seperti kesalahan pengisian monitoring oleh mahasiswa. Sosialisasi program menjadi salah satu kelemahan utama, karena tidak pernah dilakukan secara khusus, baik terkait penggunaan dana maupun pengisian prosedur Monev. Informasi hanya disebarkan melalui organisasi mahasiswa, koordinator angkatan, dan situs resmi kampus, tetapi keterbatasan transparansi mengenai waktu pencairan dan besaran dana masih menjadi masalah.

Dalam dimensi aplikasi, kegiatan implementasi telah sesuai dengan ketentuan tetap berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang ada, khususnya saat proses verifikasi yang mengacu pada kriteria sasaran dalam Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023. Persyaratan penerima seperti keterdaftaran di DTKS, kepemilikan KIP jenjang sebelumnya, bukti kondisi ekonomi, dan dokumen pendukung lainnya telah dijadikan pedoman

dalam pelaksanaan. Respons mahasiswa penerima terhadap program ini sangat positif. Mereka merasakan manfaat besar dari bantuan biaya pendidikan dan hidup, yang membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi. KIP Kuliah Merdeka juga memotivasi mereka untuk berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, sehingga program ini turut mendorong pemerataan pendidikan tinggi di lingkungan FISIP Universitas Udayana.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melaksanakan analisis terhadap hasil temuan penelitian ini dengan menggunakan teori implementasi oleh Charles O. Jones dalam Bashori, dkk (2023), dimana mengukur implementasi menggunakan 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi organisasi, dimensi interpretasi, dan dimensi aplikasi. Berikut merupakan hasil analisis temuan yang dapat peneliti uraikan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh.

3.2.1 Dimensi Organisasi

Berdasarkan pemaparan dari Charles O Jones dalam Bashori, dkk (2023) organisasi yaitu aktivitas untuk menyusun unit, badan-badan, dan metode yang dibutuhkan untuk mencapai berbagai tujuan yang terkandung dalam kebijakan. Organisasi adalah kesatuan berbagai pihak yang melaksanakan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Dalam menentukan berhasilnya suatu implementasi, Charles O. Jones menyatakan harus adanya lembaga atau organisasi yang melaksanakan. Organisasi dalam konteks ini memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek, diantaranya pelaksana kebijakan, struktur organisasi, sumber daya pendukung, pelaksanaan tugas, dan serta penetapan manajemen pelaksanaan.

Aspek pertama yaitu pelaksana kebijakan pada pengelolaan KIP Kuliah Merdeka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana telah ditetapkan dengan jelas melalui Surat Keputusan Rektor disetiap tahunnya. Pada tahun 2025, Surat Keputusan Rektor Nomor 334/UN14/HK/2025 menjadi dasar dalam menentukan siapa saja pihak yang turut serta dalam melaksanakan atau mengelola KIP Kuliah Merdeka di Fisip Unud. Dalam Surat Keputusan Rektor tersebut dapat jelas diketahuibahwa pelaksana kebijakan Program KIP Kuliah Merdeka di Fisip Unud yaitu Bapak Dr. I Made Anom Wiranata,S.IP., M.A selaku Wakil Dekan III Fisip Unud menjabat sebagai verifikator pengelola KIP Kuliah Fisip Universitas Udayana. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola KIP Kuliah Merdeka Bapak Bapak Dr. I Made Anom Wiranata,S.IP., M.A dibantu oleh Ibu Ida Ayu Putu Meiyanthi, SS yang berperan sebagai operator verifikator KIP Kuliah Merdeka di Fisip Unud.

Aspek kedua yaitu struktur organisasi, Pengelolaan KIP Kuliah Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana merupakan organisasi yang berbentuk kepanitiaan atau Ad Hoc , yang dimana berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 334/UN14/HK/2025 dalam pengelolaan KIP Kuliah Merdeka sudah terdapat struktur kepanitiaan yang jelas, diantaranya terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Validator, Verifikator, Teknis Sistem dan Administrasi.

Aspek Ketiga, sumber daya pendukung pelaksanaan program dimana dalam aspek ini baik sumber daya manusia serta sumber daya finansial sudah mencukupi untuk menunjang program KIP Kuliah Merdeka. Dimana dari segi sumber daya manusia (SDM) sudah mencukupi karena pengelolaan hanya berfokus pada verifikasi data, pelaporan status aktif mahasiswa, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan dari segi sumber daya finansial, dapat dikatakan bahwa pendanaan KIP Kuliah Merdeka sudah mencukupi untuk mendukung berlangsungnya program KIP Kuliah Merdeka, terutama dalam memberikan anggaran terkait bantuan pendidikan tinggi dan juga biaya hidup yang selalu rutin diberikan dengan jumlah yang konsisten yaitu Rp5.700.000 persemester dan juga bebas biaya Uang Kuliah Tunggal. Dari segi pendanaan operasional program juga dapat dikatakan sudah optimal hal ini terlihat dari kelancaran seluruh proses pengelolaan program tanpa ada hambatan biaya.

Aspek Keempat, yaitu pelaksanaan tugas, dalam aspek pelaksanaan tugas pengelola Program KIP Kuliah Merdeka telah berjalan optimal. Seluruh prosedur dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai dari verifikasi secara daring melalui sistem e-registrasi atau SimBea, melakukan validasi secara daring melalui e-registrasi atau SimBea, mempertanggungjawabkan dan melaporkan kegiatan verifikasi dan validasi dokumen calon mahasiswa baru penerima program KIP Kuliah Merdeka, melaporkan data status keaktifan

penerima beasiswa KIP Kuliah Merdeka serta melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam melakukan verifikasi dan validasi data penerima beasiswa dilakukan dengan ketat, melalui pengecekan keabsahan dokumen seperti slip gaji orang tua maksimum Rp4.000.000 atau kurang dari 750.000 apabila dibagi seluruh anggota keluarga, status rumah, dan data lain yang mendukung kelayakan penerima seperti kepemilikan Kartu Indonesia Pintar jenjang pendidikan menengah, Surat Keterangan Tidak Mampu, dan sebagainya. Berikutnya dalam segi pelaporan dan pertanggungjawaban, pihak pengelola KIP Kuliah Merdeka telah mengikuti pleno dengan pihak pengelola KIP Kuliah Merdeka di Universitas untuk menentukan kelayakan penerima beasiswa, hal ini merupakan langkah koordinatif antara pihak pengelola KIP Kuliah Merdeka di Fisip dengan Universitas. Selanjutnya Keberlanjutan dan Pengusulan status aktif beasiswa juga dilakukan secara rutin oleh pengelola program KIP Kuliah Merdeka di Fisip, hal ini menjadi dasar untuk mengusulkan kembali beasiswa bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria. Serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga dilakukan di akhir semester melalui sistem SimBea atau melalui monitoring dan evaluasi secara langsung, dalam hasil wawancara yang diperoleh dapat diketahui bahwa keberadaan monitoring ini dilakukan untuk melakukan pengecekan kembali terhadap kesesuaian kondisi mahasiswa dengan dokumen yang diajukan serta untuk mengetahui pertanggungjawaban dana beasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka.

Aspek Kelima, penetapan manajemen pelaksanaan, berdasarkan hasil temuan dapat diketahui bahwa manajemen pelaksanaan pengelolaan KIP Kuliah Merdeka di Fisip telah terorganisir dengan baik. Koordinasi antara pengelola program KIP Kuliah Merdeka di Fisip dengan pihak pengelola program KIP Kuliah Merdeka di Tingkat Universitas yaitu Biro Kemahasiswaan telah berjalan lancar, terutama dalam rapat pengarahan verifikasi dan validasi serta rapat pleno penetapan mahasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka di Fisip. Selain itu proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin di setiap semester untuk memastikan efektivitas program dengan adanya kerjasama yang baik antar kedua pihak pengelola program KIP Kuliah Merdeka. Koordinasi yang baik ini diperkuat melalui adanya intensitas rapat pleno yang dilakukan disetiap penerimaan calon penerima program KIP Kuliah Merdeka dimana dalam hal terdapat komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara Wakil Dekan III di Fisip selaku verifikator dan Kepala Biro Kemahasiswaan selaku penanggungjawab program KIP Kuliah Merdeka. Setiap keputusan terkait penerima beasiswa berdasarkan hasil pleno untuk memastikan transparansi dan keadilan. Dengan adanya mekanisme koordinasi tersebut manajemen pelaksanaan KIP Kuliah Merdeka di Fisip dapat berjalan optimal.

Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa indikator dimensi organisasi dalam pengelolaan KIP Kuliah Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana telah terstruktur dan berjalan dengan baik. Aspek pelaksana kebijakan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor yang jelas tiap tahunnya, struktur organisasi berbentuk kepanitiaan juga tersusun jelas yang terdiri berbagai peranan penting di dalamnya. Dari segi sumber daya pendukung pelaksanaan program, baik dari segi sumber daya manusia maupun finansial, telah mencukupi untuk menunjang keberlangsungan program. Pelaksanaan tugas berjalan optimal mulai dari verifikasi, validasi, pertanggungjawaban kepada universitas, pelaporan status aktif mahasiswa serta monitoring dan evaluasi berjalan dengan optimal. Selain itu koordinasi antara pengelola KIP Kuliah Merdeka di Fisip dengan Universitas juga berlangsung efektif melalui rapat pengarahan verifikasi dan validasi, rapat pleno hingga monitoring dan evaluasi yang dilakukan bersama secara intens pada akhir semester.

3.2.2 Dimensi Interpretasi

Interpretasi menurut Charles O Jones dalam Bashori, dkk (2023) yaitu usaha untuk memahami maksud dari pembentuk kebijakan dan kebijakan itu sendiri serta mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus terealisasi atau terwujud. Syarat utama dalam mencapai tingkat efektif pada implementasi yaitu mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu dalam dimensi interpretasi yang efektif terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi diantaranya yaitu pemahaman pelaksana program terhadap makna dan substansi dari program KIP Kuliah Merdeka, memiliki komitmen dan konsistensi dalam menjalankan tugas, serta melakukan sosialisasi atau penyebaran informasi yang berhubungan dengan kesamaan pemahaman informasi terkait Program KIP Kuliah Merdeka, apakah informasi tersebut sampai kepada kelompok atau individu sasaran yang mana dalam program ini merupakan mahasiswa penerima Program KIP Kuliah Merdeka.

Aspek pertama yaitu pemahaman pelaksana program terhadap makna dan substansi KIP Kuliah Merdeka, berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa pengelola Program KIP Kuliah Merdeka telah memiliki pemahaman yang baik terkait makna dan substansi dari program KIP Kuliah Merdeka. Hal ini terlihat dari keselarasan pemahaman mereka terhadap sasaran program KIP Kuliah Merdeka, yaitu mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi untuk menempuh pendidikan tinggi. Pengelola program KIP Kuliah Merdeka mengetahui bahwa program ini bertujuan untuk membantu mahasiswa agar mendapatkan akses pendidikan tinggi tanpa adanya keterbatasan pada kendala perekonomian. Selain itu dalam proses verifikasi, pengelola program KIP Kuliah Merdeka berpegang pada kriteria yang jelas terkait persyaratan penerima program KIP Kuliah Merdeka, seperti kejelasan data mahasiswa, penghasilan orang tua, status tempat tinggal, dan dokumen bukti pendukung lainnya bahwa mahasiswa tersebut memang benar memiliki ketidakmampuan, seperti: tercatat dalam DTKS atau penerima program KIP Kuliah Merdeka jenjang pendidikan menengah.

Aspek kedua yaitu komitmen dan konsistensi menjalankan tugas, dari segi komitmen dan konsistensi, pengelola Program KIP Kuliah Merdeka di Fisip menunjukkan tingkat dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan verifikasi calon penerima program KIP Kuliah Merdeka telah sesuai prosedur, baik dari pelaksanaan verifikasi dengan mempertimbangkan persyaratan dan juga sasaran penerima program yang sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan KIP Kuliah Merdeka dalam Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023. Selain itu komitmen dan konsistensi pelaksanaan tugas yang baik ditunjukkan melalui monitoring berkala kepada mahasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka disetiap semester akhir, baik melalui sistem SimBea di Imissu Universitas Udayana, maupun monitoring secara langsung. Penerapan kebijakan minimum IPK 3 untuk memastikan mahasiswa tetap berprestasi secara akademik juga menunjukkan bahwa pengelola Program KIP Kuliah Merdeka berkomitmen dan konsisten untuk membuat program berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan program, berikutnya pengelola program KIP Kuliah Merdeka juga diketahui memiliki komitmen dan konsistensi yang baik untuk mendukung berjalannya program, hal ini dapat diketahui melalui adanya jalinan komunikasi kepada mahasiswa penerima program, baik secara langsung maupun melalui organisasi mahasiswa dan koordinator angkatan KIP Kuliah Merdeka.

Meskipun komitmen dan konsistensi dalam menjalankan tugas sudah terealisasi dengan baik namun terdapat beberapa kendala seperti, mahasiswa yang salah mengisi laporan monitoring dan mengunggah dokumen monitoring yang tidak sesuai. Meskipun demikian, pengelola KIP Kuliah Merdeka tetap berupaya memberikan arahan langsung kepada mahasiswa agar dapat melakukan perbaikan, dimana hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam memastikan keberhasilan program.

Aspek Ketiga, terkait sosialisasi dan penyebaran informasi, berdasarkan hasil temuan penelitian tidak terdapat sosialisasi resmi yang dilakukan di tingkat fakultas, baik terkait sosialisasi pendaftaran KIP Kuliah Merdeka, sosialisasi penggunaan dana KIP Kuliah Merdeka yang efektif, maupun sosialisasi terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Pengelola Program KIP Kuliah Merdeka di Fisip menyatakan bahwa sosialisasi program lebih sering dilakukan di tingkat sekolah menengah atas (SMA) bukan kepada mahasiswa yang telah masuk ke perguruan tinggi. Ketidakberadaan sosialisasi ini menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami prosedur atau teknis pengisian monitoring dan evaluasi di akhir semester.

Terkait penyebaran informasi, pengelola KIP Kuliah Merdeka lebih banyak mengandalkan koordinator masing-masing angkatan KIP Kuliah Merdeka yang melakukan penyebaran informasi melalui grup WhatsApp. Selanjutnya penyebaran informasi juga dilakukan dengan mengandalkan organisasi mahasiswa yang ada di Fisip Universitas Udayana seperti Himpunan Mahasiswa Program Studi serta Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun meskipun terdapat media informasi yang telah tersedia, masih terdapat mahasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka yang masih kesulitan untuk mendapatkan transparansi terkait beberapa informasi, seperti minimnya informasi terkait waktu pencairan dana serta teknis penerimaan beasiswa dana KIP Kuliah Merdeka yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis hasil temuan diatas indikator dimensi interpretasi dalam pengelolaan KIP Kuliah Merdeka di Fisip Universitas Udayana, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaksana program terhadap makna dan substansi KIP Kuliah Merdeka telah baik, dengan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas

sesuai regulasi. Komitmen ini dapat dilihat dari proses verifikasi dengan mempertimbangkan aspek persyaratan dan kategori sasaran sesuai dengan regulasi, monitoring secara rutin di akhir semester, serta komunikasi aktif dengan mahasiswa penerima beasiswa. Namun terdapat kendala dalam sosialisasi resmi di tingkat fakultas, seperti tidak adanya sosialisasi terkait penggunaan dana program KIP Kuliah Merdeka, dan tidak adanya sosialisasi terkait teknis pengisian monitoring dan evaluasi sehingga menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam memahami prosedur teknis pengisian monitoring dan evaluasi. Penyebaran informasi lebih mengandalkan koordinator angkatan pada masing-masing grup angkatan KIP Kuliah Merdeka di Fisip dan organisasi mahasiswa yang ada di Fisip, tetapi terdapat keterbatasan transparansi terkait informasi waktu pencairan dana bantuan biaya hidup KIP Kuliah Merdeka dan teknis besaran penerimaan dana bantuan program.

3.2.3 Dimensi Aplikasi

Dimensi aplikasi menurut Charles O Jones dalam Bashori, dkk (2023) merupakan penerapan secara rutin dari seluruh keputusan dan berbagai peraturan dengan melaksanakan beragam kegiatan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Penerapannya sering berupa suatu proses dinamis, dimana petugas atau pelaksana dituntun oleh pedoman program, patokan-patokannya, atau secara khusus diarahkan oleh kondisi aktual. Keberhasilan Aplikasi terdiri dari dua aspek yaitu aktivitas menjalankan ketentuan yang bersifat tetap dalam mencapai sasaran dan tanggapan kelompok sasaran terkait keberadaan program, apakah lingkungan kelompok sasaran dapat menerima program dengan baik sehingga tujuan program tersebut tercapai.

Aspek pertama, aktivitas menjalankan ketentuan yang bersifat tetap dalam mencapai sasaran yaitu berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi pengelola program KIP Kuliah Merdeka yang berpedoman pada ketentuan kategori sasaran penerima program KIP Kuliah Merdeka pada Persesjen Kemendikbudristek 2023. Dalam proses verifikasi pelaksanaan program KIP Kuliah Merdeka telah berjalan sesuai ketentuan dan juga mencapai sasaran penerima program KIP Kuliah Merdeka. Hal ini diketahui dari keberlangsungan verifikasi yang mencakup pemeriksaan dokumen yang membuktikan bahwa calon penerima program KIP Kuliah Merdeka berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi tidak mampu, seperti terdaftar dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS), memiliki riwayat penerimaan KIP Pendidikan Menengah, serta menyertakan bukti pendukung seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), foto rumah, identitas keluarga dan slip gaji atau penghasilan orang tua atau wali maksimal Rp4.000.000 atau Rp750.000 apabila dibagi dengan seluruh jumlah anggota keluarga.

Aspek kedua, yaitu tanggapan terkait keberadaan program, apakah lingkungan kelompok sasaran dapat menerima program dengan baik sehingga tujuan dapat program dapat tercapai. Terkait tanggapan dari mahasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka menunjukkan bahwa KIP Kuliah Merdeka memberikan manfaat yang positif secara signifikan. Para penerima program KIP Kuliah Merdeka merasa program ini telah memberikan keterbukaan akses dan kesempatan bagi mereka untuk menempuh pendidikan tinggi, yang mungkin tidak dapat mereka capai tanpa bantuan finansial dari program ini. Hal ini diperkuat dengan pernyataan mahasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka yang menyatakan bahwa program ini mengurangi beban ekonomi keluarga serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk fokus pada akademik tanpa terkendala biaya.

Lebih lanjut mahasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka juga menekankan bahwa program ini membantu menciptakan pemerataan pendidikan tinggi, dimana mahasiswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu mendapatkan kesempatan dan akses yang sama dengan mahasiswa lainnya. Selain itu dengan adanya KIP Kuliah Merdeka membuat para mahasiswa penerima program lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasinya di bidang akademik dan non akademik. Misalkan seperti mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan juga aktif dalam kegiatan Kemahasiswaan yang dapat menambah soft skill, pengalaman, dan juga wawasan para penerima program KIP Kuliah Merdeka Fisip. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program ini telah diterima dengan baik di lingkungan Fisip Universitas Udayana.

Berdasarkan analisis hasil temuan diatas dimensi aplikasi dalam program KIP Kuliah Merdeka di Fisip Universitas Udayana menunjukkan keberhasilan dalam dua aspek utama yaitu pelaksanaan ketentuan secara tetap dan penerimaan kelompok sasaran. Proses verifikasi penerima program KIP Kuliah Merdeka telah berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan, memastikan beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang benar

benar sesuai dengan kategori sasaran penerima program KIP kuliah Merdeka yang didukung oleh dokumen persyaratan yang menunjukkan bahwa calon penerima program KIP Kuliah Merdeka benar-benar tidak mampu secara ekonomi. Selain itu tanggapan mahasiswa penerima Program KIP Kuliah Merdeka menunjukkan bahwa program ini memberikan manfaat secara signifikan untuk membantu mereka memperoleh akses dan kesemoatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Mahasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka juga menekankan bahwa program ini membantu menciptakan pemerataan pendidikan tinggi, dimana mahasiswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu mendapatkan kesempatan dan akses yang sama dengan mahasiswa lainnya. Baik dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga maupun meningkatkan motivasi akademik dan non akademik. Dengan demikian, program KIP Kuliah Merdeka telah diterima dengan baik dan berkontribusi terhadap pemerataan pendidikan tinggi di Fisip Universitas Udayana.

3.3 Rekomendasi Implementasi Program KIP Kuliah Merdeka dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

1. Optimalisasi Sosialisasi Program KIP Kuliah Merdeka

Pelaksanaan implementasi program KIP Kuliah Merdeka di Fisip Universitas Udayana memerlukan optimalisasi sosialisasi terkait program KIP Kuliah Merdeka. Terdapat dua jenis sosialisasi yang dapat mengalami optimalisasi diantaranya yaitu optimalisasi sosialisasi prosedur atau teknis pengisian monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program KIP Kuliah Merdeka. Dimana dapat dilakukan dalam bentuk pengadaan sosialisasi rutin baik secara daring maupun luring terkait prosedur atau teknis pengisian monitoring dan evaluasi. Hal ini dikarenakan banyak mahasiswa yang seringkali salah dalam melakukan pengisian form maupun penempatan bekas monitoring dan evaluasi. Dalam sosialisasi hal yang dapat disertakan yaitu video tutorial atau panduan tertulis terkait langkah-langkah untuk melakukan monitoring dan evaluasi, dimana dengan adanya video ini maka tata cara pengisian monitoring dan evaluasi yang benar dapat diakses kapan saja oleh mahasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka di Fisip. Berikutnya pengelola KIP Kuliah Merdeka dapat melaksanakan optimalisasi sosialisasi terkait penggunaan dana bantuan biaya hidup KIP Kuliah Merdeka, hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi secara langsung guna meningkatkan pertanggungjawaban mahasiswa terkait beasiswa KIP Kuliah Merdeka.

2. Peningkatan Keterbukaan Informasi

Keberadaan keterbukaan informasi kerap menjadi masalah dalam implementasi program KIP Kuliah Merdeka terutama dalam transparansi kapan waktu pencairan dana dilakukan, terkait hal ini dapat dilakukan peningkatan keterbukaan informasi seperti peningkatan *platform* digital seperti *website* resmi dan media sosial Fisip Unud atau organisasi mahasiswa Fisip Unud untuk memberikan informasi terbaru yang dapat secara mudah diakses serta transparan. Peningkatan keterbukaan informasi ini juga dapat dilakukan dengan membangun *platform* digital seperti instagram khusus KIP Kuliah Merdeka Fisip Unud untuk memberikan informasi terpusat terkait informasi-informasi baru khususnya jadwal pencairan dana yang dapat diakses bebas oleh mahasiswa penerima program.

3. Peningkatan Koordinasi antara Pengelola Program KIP Kuliah Merdeka Fisip Unud dengan Mahasiswa

Untuk memastikan pelaksanaan program KIP Kuliah Merdeka berjalan dengan baik di Fisip Universitas Udayana, harus terdapat peningkatan koordinasi antara Pengelola Program KIP Kuliah Merdeka di Fisip Universitas Udayana dengan Mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan perwakilan mahasiswa seperti koordinator angkatan pada setiap program studi untuk melakukan diskusi atau evaluasi secara rutin. Tujuan dari hal ini adalah untuk memonitoring dan mendapat informasi atau masukan terkait kendala yang dihadapi di lapangan oleh mahasiswa penerima Program KIP Kuliah Merdeka. Sehingga pengelola KIP Kuliah Merdeka dapat menentukan langkah cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan atau kendala yang terjadi di lapangan.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait kajian Implementasi Program KIP Kuliah Merdeka dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Tinggi (Studi Kasus: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program KIP Kuliah Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana telah berjalan dengan optimal dalam memberikan perluasan akses dan kesempatan bagi mahasiswa dengan latar belakang ekonomi tidak mampu untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal tersebut menjadi langkah yang signifikan dalam menciptakan pemerataan pendidikan tinggi bagi mahasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Pemerataan Pendidikan tinggi yang dimaksud adalah perolehan kesempatan dan akses yang sama dalam melangsungkan pendidikan tinggi antara mahasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka dengan mahasiswa lainnya. Namun, meskipun program ini telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Fisip Universitas Udayana, masih terdapat kendala dalam proses implementasinya, dimana dapat diketahui dari kesimpulan dibawah ini:

1. Dimensi Organisasi

Pada indikator dimensi organisasi dalam pengelolaan KIP Kuliah Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana sudah terstruktur dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari aspek pelaksana kebijakan yang jelas ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor tiap tahunnya, struktur organisasi berbentuk Ad Hoc atau kepanitiaan juga tersusun jelas yang terdiri berbagai peranan penting di dalamnya seperti Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Validator, Verifikator, Teknis Sistem dan Administrasi. Sumber daya pendukung pelaksanaan program, baik dari segi sumber daya manusia maupun finansial juga telah mencukupi untuk menunjang keberlangsungan program. Selanjutnya terkait pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan optimal mulai dari verifikasi, validasi, pertanggungjawaban kepada universitas, pelaporan status aktif mahasiswa serta monitoring dan evaluasi berjalan dengan optimal. Penetapan manajemen pelaksanaan juga terkoordinir dan berlangsung dengan baik melalui keberadaan koordinasi antara pengelola KIP Kuliah Merdeka di Fisip dengan pengelola KIP Kuliah Merdeka di tingkat Universitas yang berlangsung efektif melalui rapat pengarah verifikasi dan validasi, rapat pleno hingga monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara bersama dan teratur pada akhir semester.

2. Dimensi Interpretasi

Pada indikator dimensi interpretasi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan KIP Kuliah Merdeka di Fisip Universitas Udayana telah terpenuhi secara optimal hal ini dapat disimpulkan dari pemahaman pengelola program terhadap makna dan substansi KIP Kuliah Merdeka yang baik, dimana para pengelola Program KIP Kuliah Merdeka telah mengetahui bahwa sasaran penerima program KIP Kuliah merupakan mahasiswa yang berasal dari latar belakang kurang mampu. Berikutnya pengelola program telah melaksanakan komitmen dan konsistensi yang kuat dalam menjalankan tugas sesuai regulasi. Komitmen ini dapat dilihat dari proses verifikasi dengan mempertimbangkan aspek persyaratan dan kategori sasaran sesuai dengan Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023, monitoring secara rutin di akhir semester, serta komunikasi aktif dengan mahasiswa penerima beasiswa. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, seperti beberapa mahasiswa kerap mengalami kesalahan dan juga kebingungan terkait pengisian teknis dan juga prosedur monitoring dan evaluasi KIP Kuliah Merdeka. Berikutnya pada aspek sosialisasi, tidak adanya sosialisasi resmi di tingkat fakultas terkait penggunaan dana bantuan biaya hidup program KIP Kuliah Merdeka secara efektif dan tidak adanya sosialisasi terkait teknis atau prosedur pengisian monitoring dan evaluasi sehingga menyebabkan beberapa mahasiswa mengalami kesalahan dan kebingungan dalam pengisian monitoring dan evaluasi. Berikutnya dalam penyebaran informasi pengelola KIP Kuliah Merdeka telah memiliki media untuk menyebarkan informasi terkait KIP Kuliah Merdeka yaitu melalui koordinator angkatan pada masing-masing grup angkatan KIP Kuliah Merdeka di Fisip dan organisasi mahasiswa yang ada di Fisip, tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu keterbatasan transparansi terkait informasi waktu pencairan dana dan teknis besaran penerimaan dana bantuan program KIP Kuliah Merdeka yang kurang jelas.

3. Dimensi Aplikasi

Dimensi aplikasi dalam program KIP Kuliah Merdeka di Fisip Universitas Udayana menunjukkan keberhasilan dalam dua aspek utama yaitu aktivitas menjalankan ketentuan yang bersifat tetap dan tanggapan kelompok sasaran terkait keberadaan program. Dalam aspek aktivitas menjalankan ketentuan yang sifatnya tetap, pada proses verifikasi penentuan calon penerima program KIP Kuliah Merdeka telah berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Memastikan bahwa beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang benar benar sesuai dengan kategori sasaran penerima program KIP kuliah Merdeka yang tertuang dalam Persesjen Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023 yang didukung oleh dokumen yang menunjukan bahwa calon penerima program KIP Kuliah Merdeka benar-benar tidak mampu secara ekonomi. Berikutnya aspek tanggapan mahasiswa terkait keberadaan Program KIP Kuliah Merdeka menunjukkan respon positif bahwa program ini memberikan manfaat secara signifikan untuk membantu mahasiswa penerima program memperoleh akses dan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Mahasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka juga menekankan bahwa program ini membantu menciptakan pemerataan pendidikan tinggi, dimana mahasiswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu mendapatkan kesempatan dan akses yang sama dengan mahasiswa lainnya. baik dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga maupun meningkatkan motivasi akademik dan non akademik. Dengan demikian, program KIP Kuliah Merdeka telah diterima dengan baik dan berkontribusi terhadap pemerataan pendidikan tinggi di Fisip Universitas Udayana.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut merupakan saran yang dapat disampaikan untuk memperkuat implementasi Program KIP Kuliah Merdeka dalam mewujudkan pemerataan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana:

- 1) Melakukan optimalisasi sosialisasi program KIP Kuliah Merdeka. Optimalisasi sosialisasi yang dapat dilakukan dalam bentuk pengadaan sosialisasi rutin baik secara daring maupun luring terkait prosedur atau teknis pengisian monitoring dan evaluasi. Sosialisasi ini dapat disertai dengan video panduan atau pamflet panduan tertulis terkait prosedur ataupun teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Berikutnya pengelola program KIP Kuliah Merdeka dapat mengadakan sosialisasi dalam bentuk sosialisasi pertanggungjawaban dana bantuan biaya hidup program KIP Kuliah Merdeka, guna meningkatkan pertanggungjawaban mahasiswa terkait penggunaan dana bantuan biaya hidup Program KIP Kuliah Merdeka.
- 2) Melakukan peningkatan keterbukaan informasi terkait program KIP Kuliah Merdeka, hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan *platform* digital seperti *website* resmi Fisip Unud, media sosial Fisip Unud atau organisasi mahasiswa Fisip Unud untuk memberikan update informasi yang dapat secara mudah diakses serta transparan. Peningkatan keterbukaan informasi ini juga dapat dilakukan dengan membangun *platform* digital seperti instagram khusus KIP Kuliah Merdeka Fisip Unud untuk memberikan informasi terpusat terkait informasi-informasi baru khususnya jadwal pencairan dana yang dapat diakses bebas oleh mahasiswa penerima program KIP Kuliah Merdeka Fisip Unud.
- 3) Peningkatan koordinasi antara pengelola program KIP Kuliah Merdeka Fisip Unud dengan mahasiswa, hal ini bertujuan untuk memonitoring dan mendapat informasi atau masukan terkait kendala yang dihadapi di lapangan oleh mahasiswa penerima Program KIP Kuliah Merdeka. Dengan demikian pengelola KIP Kuliah Merdeka dapat menentukan langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang terjadi di lapangan.

Daftar Pustaka

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.

Badan Pusat Statistik. (2023). Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin, 2023. Retrieved from BPS.go.id: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NiMy/angka-partisipasi--kasar--apk--perguruan-tinggi--pt--menurut-jenis-kelamin.html>

- Badan Pusat Statistik. (2023). Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin, 2023. Retrieved from BPS.go.id: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NiMy/angka-partisipasi-kasar--apk--perguruan-tinggi--pt--menurut-jenis-kelamin.html>
- Bashori, I., Sihombing, T., & Amin, M. (2023). Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum Dan Humaniora*, 2(1), 1-12.
- Beasiswa.unud.ac.id. (2024). SK Penerima Kip Kuliah Semester Genap 2022/2023. Retrieved from Beasiswa.unud.ac.id: <https://beasiswa.unud.ac.id/informasi/detail/86>
- Fahmi, A. (2020). Eksistensi Pengelolaan Tata Usaha Pada Lembaga Tinggi Swasta. 9, 1-10.
- Fatimah Sariri, I. P. (2024). Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 12, 238-251.
- Fisip Unud. (2022). Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Denpasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
- Fisip Unud. (2022). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Tahun 2022. Retrieved From: <https://fisip.unud.ac.id/pages/laporan-akuntabilitas-kinerja-intansi-pemerintah-lakip> 140
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1). 135
- Harun. (1998). Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Tingkat SLTP Di Daerah Perbatasan Kalbar-Malaysia. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi*, 33-51.
- Hilmy, B. S. (2021). Inovasi Era SBY Membangkitkan Semangat Kesejahteraan Masyarakat. Retrieved from Kumparan.com: <https://kumparan.com/xnansu/inovasi-era-sby-membangkitkan-semangat-kesejahteraan-masyarakat-1vwr5c4CXk7>
- Ilham Ilham, I. G. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Pada Smk 2 Sojol Menggunakan Metode Ahp. *Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer (JESIK)*, 48-58.
- Imam Bashori, T. S. (2023). Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. *Histeria*, 1-12.
- Jobstreet. (2024). Persyaratan Rekrutmen Bersama BUMN dan Perusahaan Lainnya (Terbaru). Retrieved from Jobstreetbyseek: <https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/persyaratan-rekrutmen-bersama-bumn-perusahaan-lain>
- Jurnas. (2020). Rektor UT Ungkap Penyebab APK Perguruan Tinggi Indonesia Rendah. Retrieved from Jurnas.com: <https://www.jurnas.com/artikel/75777/Rektor-UT-Ungkap-Penyebab-APK-Perguruan-Tinggi-Indonesia-Rendah/>
- Kardina, M., & Magriasti, L. (2023). Peran Pendidikan Yang Berkualitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 28271- 28277.
- KBBI. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Rata. Retrieved from kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/rata>
- Khairuddin, M. H. (2019). Pengembangan Desain Produk Statue Untuk Mengenalkan Sejarah Tokoh Pahlawan Pada Mata Uang Emisi 2016. *Tugas Akhir*, 1-63.
- Lafaifa Wibawa, A. A. (2022). Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan Di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19-24.

- LKPN. (2023). Program Pemerintah Untuk Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di Desa dan Kota. Retrieved from Diklatlkpn.id: <https://diklatlkpn.id/2023/12/20/program-pemerintah-untuk-mewujudkan-pemerataan-pendidikan-di-desa-dan-kota/>
- Mar'ati, F. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Siswa SMK Muhammadiyah 1 Bantul Tahun Ajaran 2017/2018. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 7(4), 367-374.
- Mohammad Shahjahan, H. K. (2023). Effectiveness of Government Stipend Program for University Students With Disability in Bangladesh: A Study in Dhaka City. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 7(7), 746-760.
- Mukmin, T. (2018). Hubungan Pendidikan Dan Stratifikasi Sosial. 29-44.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.
- Perdana, N. S. (2024, June). Aksesibilitas Memeroleh Pendidikan Untuk Anak-anak di Indonesia. Retrieved from Jendela Kemendikbud: <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/kajian/detail/aksesibilitas-memeroleh-pendidikan-untuk-anak-anak-di-Indonesia>
- PPID. (2024, January 15). Presiden Jokowi Tekankan Peran Strategis Perguruan Tinggi Cetak SDM Unggul Indonesia. Retrieved from PPID.Setkabb.go.id: <https://ppid.setkab.go.id/presiden-jokowi-tekanakan-peran-strategis-perguruan-tinggi-cetak-sdm-unggul-Indonesia/>
- Puslapdik. (2021). Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2021. Retrieved from https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/uploads/eKt8EqCwiFPOj5SxT3vDNI6L2Ho1m4_tgl20210208212008.pdf
- Puslapdik. (2022). Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah-KIP Kuliah Merdeka 2022. Retrieved from https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/uploads/Pedoman-Pendaftaran-KIP-K-2022-ver-20220202--final_cd9b5e.pdf
- Reyes, P. (2019). The Implementation Of The Scholarship Programs Among The Student Grantees And Scholars Of Kalinga State University. *Journal of Social Science and Humanities Research*, 54-67.
- Riana, N. L. P. J., Wismayanti, K. W. D., & Wijaya, K. A. S. (2023). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 195-209.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2022). Statistik Pendidikan Tinggi 2022. Retrieved from <https://www.scribd.com/document/780564019/Buku-Statistik-Pendidikan-Tinggi-2022>
- Sidiq, U. Choiri, M.M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo: CV. Nata Karya
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD. Bandung: Alfabeta, CV.
- Supawetri, N. L. (2022). Strategi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pada Objek Wisata Broken Beach Nusa Penida Kabupaten Klungkung. *Skripsi*, 1-109 139
- Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana 293/UN14/HK/2023 tentang Penerima Beasiswa Kartu Indonesia pintar (KIP) Kuliah Merdeka Mahasiswa Angkatan 2022
- Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana No.293/UN14/HK/2024 Tentang Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Mahasiswa Angkatan 2022 Universitas Udayana Untuk Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023. Retrieved From Universitas Udayana.
- Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana No.887/UN14/HK/2024 Tentang Uang Kuliah Tunggal (Ukt) Program Diploma Dan Sarjana Unud. Retrieved From Universitas Udayana.
- Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 334/UN14/HK/2025 tentang Tim Verifikasi dan Validasi Dokumen Calon Mahasiswa Baru Penerima Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Udayana

- UNESCO. (2024). Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Retrieved from Unesco.org:<https://www.unesco.org/en/sustainabledevelopment/education>
- Universitas Udayana. (2023). Laporan Kinerja Universitas Udayana 2023. Retrieved From: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfendmkaj/https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/c904afe30288660e2a8831dc9df2b9b7.pdf
- Unud.ac.id. (2023). Penghujung Tahun 2023 Universitas Udayana Lepas 716 Wisudawan, Total Alumni Berjumlah 120.129 Orang. Retrieved from [https://www.unud.ac.id/in/berita6179-Penghujung-Tahun-2023-Universitas -Udayana-Lepas-716-Wisudawan-Total-Alumni-Berjumlah-120-129 orang](https://www.unud.ac.id/in/berita6179-Penghujung-Tahun-2023-Universitas-Udayana-Lepas-716-Wisudawan-Total-Alumni-Berjumlah-120-129-orang).
- Utami, D. P. (2021). Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi. Jurnal Inovasi Penelitian, 2375-2741.
- Valerina, G. (2024). 10 Program Beasiswa dari Perusahaan Swasta yang Wajib Kamu Tahu. Retrieved from Koin Works: [https://koinworks.com/blog /beasiswa-dari-perusahaan-swasta/](https://koinworks.com/blog/beasiswa-dari-perusahaan-swasta/)